

ket
Dag 01/02
pus
P

SKRIPSI

EDY KUSMIRAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MEREK TERKENAL**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MEREK TERKENAL**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Rahmi Jened, S.H., M.H.
NIP. 131 923 881

Penyusun,



Edy Kusmiran
NIM. 039714589

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa sampai saat ini dari Konvensi Paris sampai disetujuinya pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) belum ada satu negarapun yang mampu memberikan definisi merek terkenal. Konvensi Paris dan TRIPS serta penjelasan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 hanya memberikan kriteria merek terkenal. Karena menganut sistem konstitutif, maka untuk mendapat perlindungan merek harus didaftarkan pada kantor merek. Adapun syarat pendaftaran yaitu syarat administratif dan syarat substantif. Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi, maka Direktorat Jenderal akan mendaftarkan merek yang dimintakan pendaftaran. Dengan didaftarkan merek dalam daftar umum merek maka pemilik mempunyai hak eksklusif untuk memakai untuk dirinya sendiri dan orang lain dengan seijin pemilik dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang menggunakan mereknya tanpa seijin pemilik sesungguhnya. Pemilik merek mempunyai perlindungan hukum yang dapat berasal dari kantor merek yaitu berupa penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang telah didaftarkan dalam daftar umum merek. Perlindungan juga dapat berasal dari inisiatif pemilik merek yang merasa dirugikan atas

penggunaan mereknya yaitu berupa gugatan ganti rugi atau pembatalan merek serta permintaan penetapan sementara. Juga mempunyai perlindungan yang berasal dari aparat penegak hukum jika sudah terjadi pelanggaran merek. Karena pelanggaran merek termasuk dalam kategori kejahatan sehingga aparat penegak hukum tanpa adanya aduan dari pemilik sudah harus menindak pelaku tindak pidana merek.

Dalam upaya penegakan hukum yang selama ini terkesan pasif hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat kita masih jauh dari harapan, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pentingnya merek bagi keberhasilan suatu pemasaran. Dalam hal ini juga dipengaruhi adanya kelemahan pada aturan hukum itu sendiri yaitu mengenai kriteria merek yang didaftarkan hanya terbatas pada ketentuan Pasal 1 Sub 1 UU No. 15 Tahun 2001 dan juga belum terbentuknya susunan ketua dan anggota komisi banding serta prosedur mengajukan banding yang sampai saat ini belum ditetapkan. Kelemahan aparat penegak hukum juga mempengaruhi hal ini karena kelemahan sumber daya manusia yang ada masih perlu ditingkatkan pemahaman tentang hak atas kekayaan intelektual. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan perdata merek yang sampai saat ini masih terkonsentrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hal ini membawa akibat pemilik merek di daerah kesulitan dengan diubahnya kompetensi pengadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat ke pengadilan niaga diharapkan membawa perubahan dan lebih memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar yang ada di daerah. Karena harus dipertimbangkan faktor waktu dan biaya. Kadangkala terhadap gugatan pelanggaran merek tidak memuaskan penggugat karena ketidakkonsistenan hakim dalam memutus perkara.

2. Saran

Setelah menguraikan dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada, maka dapat penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

- a) Dalam sistem pendaftaran konstitutif tersebut diharapkan adanya kepastian hukum. Agar memudahkan pendaftaran sebaiknya dibentuk tempat pendaftaran yang dapat dilakukan di daerah dengan membentuk kantor cabang yang langsung berhubungan dengan kantor merek yang ada di Tangerang.
- b) Dalam upaya penyelesaian sengketa perdata merek yang sekarang ke pengadilan niaga dan pengadilan niaga masih relatif baru, maka perlu adanya sosialisasi tentang kompetensi pengadilan ini dan segera dibentuk susunan komisi banding merek.
- c) Untuk meningkatkan moral aparat penegak hukum agar diberikan suatu insentif yang lebih tinggi agar aparat penegak hukum

mempunyai kesejahteraan yang memadai dan peningkatan kualitas aparat penegak hukum.

- d) Karena berpengaruh pada masyarakat, maka sebaiknya diadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya merek dalam usaha perdagangan.